

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI ERA KOMUNIKASI DIGITAL

Falikh Hardian¹, Sari Endah Nursyamsi², Ibrahim³, Sheva Hilmi Rahmandani⁴^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya¹falikhhardian@gmail.com, ²sariendah@dsn.ubharajaya.ac.id, ³ibrahimbaim.bw@gmail.com,
⁴shevahilmi8@gmail.com**Abstrak**

Makalah ini membahas tentang etika dan tanggung jawab pengguna media sosial di era komunikasi digital, di mana perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi. Media sosial memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk mengekspresikan diri tanpa batas ruang dan waktu, namun kebebasan tersebut sering kali disalahgunakan hingga menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, etika digital menjadi sangat penting untuk diterapkan agar ruang komunikasi tetap sehat dan bermoral.

Kata Kunci: Etika Digital, Tanggung Jawab Sosial, Media Sosial, Komunikasi Digital, Disinformasi

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial untuk berbagai hal mulai dari berkomunikasi, mencari informasi sampai mengekspresikan diri. Media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era komunikasi digital yang serba cepat ini. Segala sesuatu bisa dibagikan dan diketahui oleh banyak orang hanya dalam hitungan detik. Melalui media sosial, setiap individu dapat dengan mudah berbagi informasi, mengekspresikan pendapat, serta membangun jaringan sosial tanpa batas ruang dan waktu.

Tapi di balik semua kemudahan itu, ada tanggung jawab besar yang sering dilupakan pengguna media sosial. Banyak orang yang dengan mudah menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya, menggunakan kata-kata kasar, atau bahkan menyerang orang lain secara pribadi. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa sebagian pengguna belum memahami pentingnya etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital.

Padahal, etika sangat dibutuhkan agar media sosial tidak disalahgunakan dan tetap menjadi ruang yang positif. Setiap pengguna perlu sadar bahwa apa pun yang dibagikan di internet bisa berdampak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

TINJAUAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial merupakan hal penting dalam membangun komunikasi digital yang sehat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lisda Waty Harianja (2023), media sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara individu berinteraksi dan membentuk opini publik, sehingga perilaku pengguna di dalamnya perlu diatur oleh nilai-nilai etika.

Sementara itu, penelitian oleh Andi Asari (2023) menjelaskan bahwa komunikasi digital yang tidak disertai dengan kesadaran etika dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi dan penyebaran hoaks. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab moral setiap pengguna media sosial dalam berpartisipasi di ruang digital.

Amin Abidin (2021) juga menegaskan melalui kajian tentang teori eudemonisme bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai jika manusia bertindak secara bermoral dan bertanggung jawab. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks penggunaan media sosial, di mana setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain.

Pengertian Etika

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. (Ferdinand et al., 2017)

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Teori Eudemonisme ini dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 SM. Menurut Aristoteles makna atau tujuan kehidupan yang paling tinggi adalah kebahagiaan. Jika manusia menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, maka ia akan mencapai tujuan akhir atau kebahagiaan. (Amin, Abidin, 2021)

Dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai ilmu tentang adat dan kebiasaan. Etika merupakan salah satu disiplin ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari tentang moral. Selain etika, terdapat beberapa disiplin ilmiah lain yang mempelajari moral, antara lain antropologi, sosiologi, dan psikologi. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam memahami moral. (Patuju, 2023)

Pengertian Media Sosial

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. (Lisda Waty Harianja, 2023)

Media sosial bisa diartikan sebagai tempat bagi orang untuk saling berhubungan, bertukar informasi, dan menyalurkan pendapat lewat internet. Melalui media sosial, siapa saja bisa berkomunikasi tanpa harus dibatasi oleh waktu ataupun jarak. Kalau dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau lewat telepon, sekarang semuanya jadi lebih mudah karena cukup dengan satu sentuhan di layar, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai wilayah, bahkan luar negeri. Secara singkat, media sosial merupakan ruang digital tempat pengguna bisa berinteraksi, berbagi cerita, dan menampilkan dirinya di depan publik.

Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat, seperti memperluas jaringan pertemanan, memudahkan penyebaran informasi, dan menjadi wadah kreativitas. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan kesadaran etika dan tanggung jawab dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu, perundungan daring, hingga pelanggaran privasi. Oleh karena itu, memahami pengertian dan

fungsi media sosial secara benar menjadi langkah awal sebelum membahas lebih jauh tentang etika dan tanggung jawab pengguna di era komunikasi digital.

Pengertian Komunikasi Digital

Komunikasi digital dapat didefinisikan sebagai proses pemindahan pesan atau informasi dari komunikator ke komunikator melalui media digital. Karakteristik komunikasi digital sangat berbeda dengan komunikasi tradisional. Perbedaan pertama adalah bagaimana informasi digabungkan, dikemas dan disajikan. Komunikasi digital lebih cepat dan lebih nyaman. Selain itu, berbagai fitur teknologi yang memungkinkan pesan dikemas dan disampaikan dengan cara yang unik dan menawan membuat komunikasi digital jauh lebih unggul dalam daya tarik pesan. (Andi Asari, 2023)

Perkembangan teknologi membuat komunikasi digital menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kalau dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara tatap muka, kini semua bisa dilakukan secara cepat dan mudah tanpa harus berada di tempat yang sama. Komunikasi digital juga memungkinkan siapa pun untuk mengirim pesan ke banyak orang sekaligus, bahkan ke seluruh dunia, hanya dalam hitungan detik.

Selain kecepatan dan kemudahan, komunikasi digital juga punya ciri khas lain, yaitu bersifat interaktif dan terbuka. Artinya, pesan yang disampaikan bisa langsung ditanggapi oleh orang lain, dan informasi bisa diakses siapa saja yang terhubung dengan jaringan internet. Namun, karena sifatnya yang terbuka ini, komunikasi digital juga memiliki risiko seperti penyalahgunaan informasi, penyebaran hoaks, atau komentar negatif yang bisa merugikan orang lain. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pengguna untuk memiliki etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi secara digital. Dengan menerapkan komunikasi yang sopan, jujur, dan menghargai orang lain, ruang digital bisa menjadi tempat yang bermanfaat dan menyenangkan bagi semua orang.

Etika Komunikasi Digital

Etika komunikasi digital adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan berinteraksi ketika menggunakan media digital, seperti media sosial, email, forum, atau aplikasi pesan. Etika ini mencakup cara berbicara, menyampaikan pendapat, dan menanggapi orang lain agar komunikasi tetap sopan, jujur, serta tidak menyinggung pihak lain. Etika komunikasi digital berarti berperilaku baik dan bertanggung jawab di dunia maya, sama seperti ketika kita berkomunikasi di dunia nyata. Setiap tindakan, komentar, atau informasi yang dibagikan di internet sebaiknya dipikirkan dulu dampaknya, karena apa pun yang kita tulis bisa dilihat banyak orang dan meninggalkan jejak digital.

Tujuan dari etika komunikasi digital adalah untuk membentuk perilaku yang baik dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya. Dengan adanya etika, setiap pengguna diharapkan bisa menggunakan media digital secara bijak, menghormati orang lain, dan menjaga kenyamanan bersama dalam berkomunikasi. Etika komunikasi digital juga bertujuan agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau merugikan pihak lain.

Secara umum, etika komunikasi digital berlandaskan pada beberapa prinsip penting yang perlu dijaga oleh setiap pengguna media digital. Prinsip tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, empati, dan keadilan. Kejujuran berarti tidak menyebarkan berita palsu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Tanggung jawab menuntut setiap orang untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu agar tidak merugikan pihak lain. Sopan santun dan empati penting dijaga agar komunikasi tetap menghormati perasaan orang lain dan tidak menimbulkan konflik.

Landasan Teori

Teori Eudemonisme

Prinsip dasar etika Aristoteles adalah bahwa kita hendaknya hidup dan bertindak sedemikian rupa sehingga kita mencapai hidup yang baik, yang bermutu, yang berhasil. Hidup kita berhasil apabila kita mencapai tujuan terakhir yang kita cari melalui segala usaha kita: Kebahagiaan, bahasa Yunani: eudaimonia. Maka etika Aristoteles disebut eudemonisme. Kebahagiaan akan semakin kita nikmati semakin kita merealisasikan potensipotensi kita sebagai manusia. Etika menawarkan petunjuk ke hidup bahagia itu. (Magnis Suseno, 2013)

Teori Eudemonisme termasuk dalam teori etika normatif yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui tindakan bermoral. Dalam konteks penggunaan media sosial, teori ini dapat dijadikan landasan bahwa setiap tindakan pengguna di ruang digital seharusnya mengarah pada kebaikan dan kebahagiaan bersama, bukan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Teori Tanggung Jawab Sosial

Kemunculan teori pers tanggung jawab sosial berawal dari pengembangan teori sebelumnya yaitu teori liberal, yang kala itu di anggap telah gagal untuk menempati janji dalam penggunaan kebebasan pers secara bertanggung jawab. Biasanya teori tanggung jawab sosial diterapkan di negara- negara yang menganut sistem demokrasi salah satunya adalah negara Indonesia Teori tanggung jawab sosial menganggap bahwa di dalam kebebasan mengandung yang namanya suatu tanggung jawab yang sama. Kelebihan dari teori ini yaitu masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam kebebasannya, sehingga dengan adanya kebebasan ini diharapkan dapat meminimalkan adanya keretakan dalam sebuah negara, dan setiap individu memiliki hak yang sama dengan pemerintah. (De Fretes & A.W. Kaligis, 2018)

Dalam konteks media sosial, teori ini sangat relevan karena pengguna diberikan kebebasan yang sangat luas untuk berbagi dan mengekspresikan diri. Namun, kebebasan tersebut sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau menyerang orang lain. Oleh karena itu, teori tanggung jawab sosial menekankan bahwa kebebasan berekspresi di dunia digital harus diimbangi dengan kesadaran moral, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama pengguna. Dengan menerapkan teori ini, pengguna media sosial diharapkan mampu bersikap bijak dan berpikir sebelum bertindak. Setiap unggahan, komentar, atau opini yang dibagikan sebaiknya tidak hanya mencerminkan kebebasan pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan kepentingan publik.

METODE PENULISAN

Jenis Penulisan

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. (Dwitri Pilendia, 2020)

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literature review yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini juga menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta perlakuan tambahan lainnya. Sumber utama penelitian ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan literature review, seperti buku metode penelitian, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait. (Ridwan et al., 2021)

Makalah ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi literatur dipilih karena penulisan ini tidak melakukan penelitian langsung ke lapangan, melainkan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berita daring. Pendekatan deskriptif

digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena mengenai etika dan tanggung jawab pengguna media sosial berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu.

Pendekatan Penulisan

Metode penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa data deskriptif. Data-data deskriptif tersebut bersumber dari hasil pengamatan baik dalam bentuk tertulis, lisan atau perilaku dari subjek penelitian. Data deskriptif atau naratif terbentuk dari hasil eksplorasi dan pemaknaan peneliti terhadap lingkungan sosial yang diteliti. (Natalina Nilamsari, 2014)

Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan dengan etika dan tanggung jawab pengguna media sosial, yang bersifat sosial dan berkaitan dengan nilai-nilai moral, bukan hal yang bisa diukur secara kuantitatif. Melalui pendekatan kualitatif, penulis dapat menelaah perilaku pengguna media sosial dari sisi makna, sikap, dan tanggung jawab berdasarkan teori yang relevan. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif membantu penulis menjelaskan bagaimana konsep etika dan tanggung jawab diterapkan dalam komunikasi digital secara lebih mendalam dan menyeluruh, sesuai dengan konteks sosial masyarakat saat ini.

Sumber Data

Data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder dimanfaatkan untuk mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data primer didapat berdasarkan survei lapangan dengan melakukan pengamatan lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapat berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data- data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis. (Suprayogo et al., 2014)

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan. (Rukhmana, 2021)

Dalam penulisan ini, sumber data diperoleh melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, berita daring, serta situs resmi yang membahas mengenai etika dan tanggung jawab pengguna media sosial di era komunikasi digital. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat teori dan argumen yang disajikan dalam pembahasan, sehingga penulisan makalah ini memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini adalah studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena seluruh data dan informasi dalam penulisan makalah ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, bukan dari hasil observasi atau wawancara secara langsung di lapangan. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual tentang etika serta tanggung jawab pengguna media sosial di era komunikasi digital, sehingga penulis dapat menyusun pembahasan yang komprehensif berdasarkan literatur yang sudah ada.

Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam konteks penulisan ilmiah, studi pustaka berfungsi untuk memberikan dasar teori yang kuat, menemukan kesenjangan penelitian sebelumnya, dan memperluas pemahaman terhadap isu yang dibahas. Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga melakukan proses seleksi, analisis, dan interpretasi terhadap informasi yang ditemukan.

Selain itu, menurut Nazir (2014), penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data melalui penelusuran literatur untuk memecahkan masalah penelitian secara konseptual dan teoritis. Artinya, studi pustaka dilakukan dengan menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang sedang dibahas. Pendapat ini menegaskan bahwa kegiatan studi pustaka bukan hanya membaca sumber-sumber tertulis, tetapi juga melibatkan kemampuan kritis dalam memahami serta mengaitkan teori dengan realitas sosial yang terjadi.

Selain fungsi akademik, teknik studi pustaka juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis penulis. Melalui kegiatan membaca dan menelaah literatur, penulis belajar bagaimana membandingkan pendapat para ahli, menilai keakuratan data, dan merangkai argumen berdasarkan bukti yang logis. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2017) yang menjelaskan bahwa studi pustaka merupakan bagian dari proses ilmiah untuk membangun kerangka berpikir yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengumpulan data melalui studi pustaka bukan hanya sebagai tahap awal penulisan, melainkan juga menjadi bagian integral dari proses berpikir ilmiah yang berkesinambungan.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dalam makalah ini tidak hanya berfungsi sebagai cara mengumpulkan informasi, tetapi juga sebagai proses memahami nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam teori serta praktik komunikasi digital. Melalui studi pustaka, penulis berusaha mengaitkan antara teori yang bersifat konseptual dengan realitas yang terjadi di dunia digital. Dari sini, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana etika dan tanggung jawab pengguna media sosial dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di era komunikasi modern.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data dan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur, kemudian disusun dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas. Menurut Sugiyono (2017), analisis deskriptif merupakan teknik yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Dalam konteks penulisan ini, teknik analisis deskriptif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku pengguna media sosial, khususnya dalam hal etika dan tanggung jawab di era komunikasi digital. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, seperti teori, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu, kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada konteks kehidupan sosial masyarakat saat ini.

Proses analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, penulis menyeleksi data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik. Kedua, data tersebut disusun berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep etika, tanggung jawab sosial, dan perilaku komunikasi digital. Ketiga, penulis menginterpretasikan data tersebut dengan mengaitkannya pada teori yang digunakan, yaitu teori eudemonisme dan teori tanggung jawab sosial. Melalui proses ini, penulis berusaha menampilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana teori dapat diterapkan dalam konteks penggunaan media sosial di kehidupan sehari-hari.

Analisis deskriptif kualitatif tidak hanya berfokus pada penyajian data secara tekstual, tetapi juga pada pemaknaan terhadap informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, penulis tidak sekadar menyusun ulang teori dari berbagai sumber, melainkan juga mencoba menafsirkan dan membandingkan pandangan para ahli untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang pentingnya penerapan etika dan tanggung jawab sosial di media digital.

Selain itu, penggunaan analisis deskriptif juga membantu penulis menilai kesesuaian antara teori dan kenyataan. Misalnya, bagaimana prinsip eudemonisme tentang kebahagiaan melalui perbuatan baik dapat diterapkan dalam perilaku pengguna media sosial agar tercipta lingkungan digital yang sehat. Begitu pula teori tanggung jawab sosial, yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kesadaran moral dalam bermedia. Dengan menganalisis data berdasarkan teori tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Secara keseluruhan, teknik analisis deskriptif kualitatif memberikan kerangka kerja yang fleksibel bagi penulis untuk menelaah berbagai pandangan, teori, dan fenomena sosial tanpa harus menggunakan data statistik. Analisis ini berfokus pada pemahaman makna di balik perilaku pengguna media sosial, sehingga hasil penulisan dapat menggambarkan pentingnya penerapan etika dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas komunikasi di era digital yang semakin berkembang.

PEMBAHASAN

Etika dalam Komunikasi Digital

Etika dalam komunikasi digital merupakan fondasi utama dalam menjaga interaksi di dunia maya agar tetap berjalan dengan baik, sehat, dan bertanggung jawab. Perkembangan teknologi informasi membuat siapa pun dapat dengan mudah menyampaikan pesan, pendapat, bahkan emosi secara langsung kepada banyak orang. Namun, kemudahan ini sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran etika dalam berkomunikasi. Banyak pengguna yang lupa bahwa setiap tindakan atau kata yang mereka sampaikan di dunia digital memiliki konsekuensi moral dan sosial.

Komunikasi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Melalui media sosial, forum daring, dan platform pesan instan, setiap individu bisa berkomunikasi lintas daerah, bahkan lintas negara, hanya dalam hitungan detik. Dalam situasi seperti ini, batas antara ruang pribadi dan ruang publik menjadi kabur. Hal inilah yang menuntut adanya pemahaman etika digital agar seseorang tidak semena-mena dalam menyampaikan sesuatu di ruang online.

Etika komunikasi digital mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan empati. Misalnya, dalam menyampaikan pendapat di media sosial, penting untuk tetap menghargai pandangan orang lain meskipun berbeda pendapat. Sementara dalam berbagi informasi, pengguna sebaiknya memastikan terlebih dahulu kebenaran dan sumber data yang dibagikan. Hal-hal sederhana seperti ini sering kali diabaikan, padahal menjadi inti dari etika dalam komunikasi digital.

Salah satu penyebab utama menurunnya etika digital adalah kebebasan berekspresi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik. Banyak pengguna merasa bahwa ruang digital adalah tempat bebas yang tidak memiliki batasan hukum maupun moral. Padahal, segala bentuk interaksi di internet juga tunduk pada norma sosial dan hukum yang berlaku. Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying adalah contoh nyata ketika kebebasan tanpa etika justru menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Etika digital juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi seseorang di dunia maya. Citra diri atau reputasi digital terbentuk dari bagaimana seseorang berperilaku, menulis, dan berinteraksi dengan orang lain secara online. Sekali seseorang melakukan tindakan yang melanggar etika, seperti menyebar fitnah atau ujaran kebencian, jejak digitalnya bisa bertahan lama dan berdampak pada kehidupan sosial bahkan karier di masa depan.

Selain individu, lembaga dan organisasi juga dituntut memiliki etika digital dalam berkomunikasi. Banyak institusi menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, publikasi, atau penyampaian informasi publik. Ketika lembaga tidak berhati-hati dalam menyampaikan pesan, hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman yang luas. Oleh karena itu, penerapan etika

komunikasi digital tidak hanya berlaku untuk pengguna pribadi, tetapi juga bagi institusi, perusahaan, dan bahkan pemerintah.

Pemerintah sendiri memiliki peran strategis dalam membangun budaya komunikasi digital yang beretika. Melalui kebijakan dan regulasi, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap masyarakat dari konten berbahaya. Hal ini penting karena dunia digital tidak sepenuhnya netral—ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran ide ekstrem, atau eksploitasi informasi pribadi yang dapat mengancam keamanan publik.

Pada akhirnya, etika digital tidak hanya berbicara tentang apa yang benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat digital yang saling terhubung. Dunia maya bukanlah ruang tanpa batas, melainkan perpanjangan dari kehidupan nyata, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, sikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab harus tetap dijaga meskipun berada di balik layar.

Tanggung Jawab Media Sosial

Pengguna media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk lingkungan digital yang sehat dan beretika. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial kini tidak hanya menjadi sarana hiburan atau komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi ruang publik yang memengaruhi opini, budaya, dan perilaku masyarakat. Karena itulah, setiap individu yang aktif di media sosial memiliki tanggung jawab moral dan sosial atas setiap konten yang ia buat, bagikan, atau komentari.

Tanggung jawab pengguna media sosial dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti bagaimana seseorang menjaga citra, sikap, dan perilakunya di dunia maya agar tetap positif dan mencerminkan kepribadian yang baik. Sedangkan tanggung jawab terhadap orang lain berkaitan dengan bagaimana seseorang menghargai hak dan perasaan orang lain dalam berinteraksi secara digital.

Dalam konteks komunikasi digital, kebebasan berekspresi adalah hak semua orang, tetapi kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Di sinilah konsep etika dan tanggung jawab sosial menjadi penting. Menurut teori Tanggung Jawab Sosial, setiap individu yang memiliki kebebasan berpendapat juga wajib mempertimbangkan dampak dari apa yang ia sampaikan terhadap masyarakat luas. Artinya, kebebasan berekspresi bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi bebas yang disertai kesadaran moral dan sosial.

Sebagai contoh, seseorang yang ingin menyampaikan kritik di media sosial tentu boleh melakukannya, namun cara penyampaian kritik tersebut harus tetap sopan dan tidak melanggar etika. Kritik yang disampaikan dengan kata-kata kasar, penghinaan, atau fitnah hanya akan memperburuk suasana dan menimbulkan konflik. Tanggung jawab pengguna di sini adalah memastikan bahwa apa yang ia sampaikan bertujuan untuk memberikan solusi, bukan menciptakan masalah baru.

Tanggung jawab etika pengguna juga mencakup bagaimana seseorang menghormati privasi orang lain. Mengunggah foto, video, atau data pribadi orang lain tanpa izin adalah pelanggaran serius terhadap etika digital. Tindakan seperti ini tidak hanya dapat menyinggung perasaan seseorang, tetapi juga melanggar hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Selain menjaga etika dalam konten, tanggung jawab pengguna juga berkaitan dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Sering kali, karena merasa aman di balik layar, seseorang menjadi lebih berani berkata kasar, menghakimi, atau bahkan melakukan *cyberbullying*.

Dalam kaitannya dengan teori Eudemonisme, tanggung jawab pengguna media sosial juga dapat dipandang sebagai bagian dari usaha mencapai kebahagiaan yang sejati. Menurut teori ini, kebahagiaan tidak hanya diukur dari kepuasan pribadi, tetapi juga dari kebaikan moral yang dilakukan terhadap orang lain. Ketika seseorang menggunakan media sosial untuk hal-hal positif

seperti berbagi ilmu, mendukung sesama, atau menyebarkan kebaikan, ia tidak hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga menciptakan rasa puas dan damai dalam dirinya sendiri. Tanggung jawab pengguna juga perlu diperkuat melalui kesadaran literasi digital.

Tantangan Etika di Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam hal kemudahan komunikasi dan akses informasi. Namun, di balik semua kemajuan itu, muncul berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan etika dalam berkomunikasi. Dunia digital memberikan kebebasan luar biasa bagi penggunanya, tetapi kebebasan itu sering kali disalahgunakan hingga menimbulkan masalah sosial yang kompleks. Tantangan etika di era digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut moral, kesadaran, dan tanggung jawab setiap pengguna media sosial.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah penyebaran disinformasi dan berita palsu (hoaks). Informasi di dunia maya beredar dengan sangat cepat, dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenarannya. Banyak pengguna langsung percaya dan membagikan ulang tanpa mengecek sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, hoaks dapat menimbulkan kepanikan, perpecahan, bahkan konflik di masyarakat. Masalah ini semakin parah ketika informasi palsu digunakan untuk tujuan politik atau ekonomi, sehingga mengaburkan batas antara fakta dan opini.

Selain disinformasi, tantangan lain yang tidak kalah serius adalah meningkatnya ujaran kebencian dan perundungan daring (cyberbullying). Banyak pengguna merasa lebih bebas berkomentar kasar atau menghina karena merasa aman di balik layar. Perilaku ini menunjukkan menurunnya kesadaran etika dan empati dalam berkomunikasi. Padahal, dampak psikologis dari ujaran kebencian di dunia maya bisa sama beratnya dengan kekerasan verbal di dunia nyata. Korban bisa merasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami trauma.

Tantangan berikutnya adalah penyalahgunaan privasi dan data pribadi. Banyak orang yang tanpa sadar membagikan terlalu banyak informasi tentang dirinya di media sosial. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian data, penipuan daring, atau penyebaran konten pribadi tanpa izin. Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital membuat banyak pengguna menjadi rentan terhadap eksploitasi semacam ini. Etika digital menuntut agar setiap pengguna lebih berhati-hati dan bijak dalam menjaga informasi pribadinya serta menghormati privasi orang lain.

Menghadapi semua tantangan ini, solusi tidak bisa datang dari satu pihak saja. Pemerintah, lembaga pendidikan, media, platform digital, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menegakkan nilai-nilai etika di dunia maya. Pendidikan literasi digital perlu ditingkatkan agar pengguna mampu berpikir kritis, memahami cara kerja media, serta memilah informasi yang benar. Di sisi lain, platform media sosial juga perlu memperkuat sistem moderasi konten agar penyebaran informasi berbahaya bisa dikendalikan tanpa mengurangi kebebasan berekspresi.

Dengan memahami berbagai tantangan etika di era digital, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan teknologi. Etika bukan sekadar aturan, tetapi panduan moral agar dunia digital tetap menjadi ruang yang aman, positif, dan bermanfaat bagi semua. Ketika setiap individu mampu menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab, maka tantangan etika yang muncul seiring kemajuan teknologi dapat dihadapi dengan lebih baik.

Seruan Pemerintah terhadap Platform Besar untuk Menangani Konten Disinformasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem digital agar tetap sehat dan aman. Di tengah maraknya penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian di dunia maya, pemerintah terus menyerukan kepada platform besar seperti Meta, TikTok, YouTube, dan X (Twitter) untuk lebih aktif dalam menangani konten berbahaya. Seruan ini merupakan bentuk tanggung jawab

pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif dunia digital, sekaligus upaya mewujudkan komunikasi yang beretika di era teknologi informasi.

Disinformasi menjadi ancaman serius karena dapat memengaruhi opini publik dan menimbulkan keresahan sosial. Dalam banyak kasus, berita palsu sengaja dibuat untuk kepentingan politik, ekonomi, atau sekadar untuk mendapatkan perhatian publik. Ketika konten semacam ini tersebar luas di media sosial, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah menilai perlu adanya kerja sama yang kuat dengan platform digital untuk memastikan bahwa penyebaran konten berbahaya dapat diminimalkan.

Seruan pemerintah kepada platform besar juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa penindakan saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kesadaran pengguna. Melalui berbagai program seperti *Siberkreasi* dan *Gerakan Nasional Literasi Digital*, Kominfo berusaha membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis, mengenali informasi palsu, dan memahami etika dalam berinteraksi di dunia maya. Langkah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga etika digital bukan hanya milik individu, tetapi juga kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pengguna.

Selain kebijakan formal, pemerintah juga menggunakan pendekatan komunikasi publik untuk menyampaikan pesan etika digital kepada masyarakat. Misalnya, melalui kampanye bertema **#BijakBersosmed** dan **#StopHoaks**, Kominfo mengajak pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Kampanye ini disebarluaskan melalui berbagai platform, termasuk televisi, media sosial, dan kerja sama dengan influencer atau tokoh publik. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kolektif bahwa setiap pengguna memiliki tanggung jawab moral terhadap isi dan dampak dari apa yang ia bagikan.

Secara keseluruhan, seruan pemerintah terhadap platform besar untuk menangani konten disinformasi merupakan langkah strategis dalam membangun ruang digital yang lebih bertanggung jawab. Upaya ini sejalan dengan nilai-nilai etika dan teori tanggung jawab sosial yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan moral publik. Kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan dunia digital yang aman, etis, dan beradab.

Studi Kasus: Penanganan Konten Disinformasi oleh Pemerintah dan Platform Digital di Indonesia (Kasus Hoaks Pemilu 2024 di TikTok)

Salah satu contoh nyata penerapan etika dan tanggung jawab digital di Indonesia dapat dilihat dari penanganan penyebaran konten disinformasi menjelang Pemilu 2024. Pada masa kampanye, berbagai informasi palsu dan ujaran kebencian banyak beredar di media sosial seperti TikTok, Facebook, dan X (Twitter). Banyak dari konten tersebut berisi provokasi, manipulasi video, serta tuduhan tanpa dasar terhadap tokoh politik, lembaga pemilu, hingga pemerintah. Situasi ini berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bawaslu mengambil langkah tegas dengan menggandeng perusahaan teknologi global seperti Meta dan TikTok. Pemerintah menyerukan agar platform tersebut lebih aktif melakukan moderasi konten, terutama terhadap unggahan yang terbukti menyesatkan atau berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Menurut laporan resmi Kominfo pada awal 2024, terdapat lebih dari 1.800 konten hoaks terkait Pemilu yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Dari jumlah itu, sebagian besar ditemukan di platform Facebook dan TikTok. Kominfo bekerja sama dengan AIS (Aduan Konten Internet Sehat) untuk mempercepat pelaporan, sementara Meta dan TikTok melakukan penghapusan otomatis terhadap konten yang dikategorikan sebagai disinformasi berbahaya. Langkah ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan platform digital dalam menjaga ruang publik daring agar tetap aman dan beretika.

Dari perspektif teori Tanggung Jawab Sosial, langkah pemerintah dan perusahaan digital ini mencerminkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga kepentingan publik. Sementara dari teori Eudemonisme, kerja sama ini merupakan bentuk upaya mencapai kebahagiaan dan kebaikan Bersama.

Kasus ini membuktikan bahwa penegakan etika komunikasi digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah memegang peran sebagai regulator, platform digital sebagai penyedia ruang interaksi, dan masyarakat sebagai pengguna yang memiliki kesadaran moral. Ketika ketiganya saling bekerja sama, maka ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih sehat, informatif, dan beradab. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa penanganan konten disinformasi bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial untuk menjaga kebenaran dan harmoni dalam kehidupan digital bangsa Indonesia.

Implementasi Etika dan Kebijakan dalam Kehidupan Digital

Implementasi etika dan kebijakan dalam kehidupan digital merupakan langkah nyata untuk mewujudkan ruang komunikasi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Setelah pemerintah membuat berbagai regulasi serta platform digital memperkuat sistem moderasi konten, pada akhirnya semua kebijakan itu akan kembali pada sejauh mana masyarakat mampu menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari di dunia maya. Etika dan kebijakan digital tidak akan berarti banyak jika tidak disertai kesadaran pengguna untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku.

Dalam kehidupan digital, etika dapat diimplementasikan melalui hal-hal sederhana, seperti berhati-hati dalam membagikan informasi, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghargai privasi orang lain. Sikap-sikap dasar ini menunjukkan tanggung jawab moral setiap individu terhadap ruang publik digital yang mereka gunakan. Misalnya, sebelum membagikan sebuah berita atau video, pengguna sebaiknya memastikan terlebih dahulu kebenarannya dan mempertimbangkan dampak dari informasi tersebut. Langkah kecil ini jika dilakukan oleh banyak orang akan menciptakan lingkungan digital yang jauh lebih positif dan produktif.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan etika digital perlu dijalankan secara berkelanjutan agar dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu contoh implementasi kebijakan tersebut adalah melalui program literasi digital nasional yang diselenggarakan oleh Kominfo bekerja sama dengan berbagai komunitas dan lembaga pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, sopan santun, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara digital. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi warga digital yang cerdas dan beretika.

Selain masyarakat umum, para pembuat konten (*content creator*) dan influencer juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan etika digital. Mereka memiliki pengaruh yang luas terhadap opini publik, sehingga setiap konten yang dibuat sebaiknya memperhatikan dampaknya bagi masyarakat. Ketika seorang influencer menggunakan platformnya untuk menyebarkan pesan positif, mengedukasi pengikutnya, atau mendukung kampanye sosial, itu sudah menjadi bentuk nyata penerapan etika komunikasi digital.

Implementasi etika dan kebijakan digital juga harus melibatkan dunia pendidikan. Sekolah dan universitas berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar lebih sadar dan bijak dalam menggunakan teknologi. Melalui pembelajaran literasi digital, siswa dan mahasiswa dapat memahami bagaimana berinteraksi secara sopan di dunia maya, menghargai perbedaan pendapat, serta menyadari konsekuensi dari setiap tindakan digital yang mereka lakukan. Pendidikan semacam ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga matang secara etika.

Selain pendidikan, kerja sama antara pemerintah dan platform besar seperti Meta, TikTok, dan YouTube juga menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan etika digital. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas, sedangkan platform berperan sebagai pelaksana teknis dalam menjaga kualitas konten di ruang publik digital. Implementasi ini dapat

dilihat dari adanya fitur pelaporan konten (*report system*), penghapusan otomatis terhadap konten berbahaya, hingga pembatasan algoritma bagi penyebar hoaks atau ujaran kebencian. Semua langkah ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun ruang digital yang aman dan etis.

Pada akhirnya, penerapan etika dan kebijakan digital adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menciptakan aturan, platform menjalankan kebijakan teknis, dan masyarakat menjalankan kesadaran moral dalam setiap aktivitasnya di dunia maya. Ketika ketiga elemen ini berjalan seimbang, maka ekosistem digital dapat menjadi ruang yang tidak hanya bebas dan terbuka, tetapi juga bermartabat dan beretika.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika dan tanggung jawab pengguna media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas komunikasi digital di era modern. Perkembangan teknologi informasi memang memberikan kemudahan luar biasa dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik kemudahan itu muncul tantangan besar, terutama dalam hal menjaga moralitas, kebenaran informasi, dan keamanan interaksi di dunia maya. Etika digital hadir sebagai pedoman agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan dan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan serta tanggung jawab sosial.

Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang ia unggah dan bagikan. Sikap hati-hati, menghargai orang lain, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya menjadi bentuk konkret penerapan etika digital. Perilaku yang tidak etis, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau pelanggaran privasi, dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kesadaran individu menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan harmonis.

Selain tanggung jawab individu, peran pemerintah juga sangat krusial dalam menegakkan etika digital. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah telah berupaya menjaga ruang publik digital dengan berbagai kebijakan, seperti penerapan sistem moderasi konten, pengawasan terhadap platform besar, serta kampanye literasi digital nasional. Seruan pemerintah kepada platform seperti Meta, TikTok, dan YouTube agar lebih aktif menangani konten disinformasi menunjukkan adanya perhatian serius terhadap bahaya konten negatif di dunia maya. Kebijakan ini sejalan dengan teori Tanggung Jawab Sosial, yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai kewajiban moral untuk menjaga kepentingan publik.

Melalui studi kasus penanganan konten hoaks Pemilu 2024, dapat dilihat bahwa kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Kominfo berhasil mengidentifikasi dan menindak lebih dari 1.800 konten hoaks selama masa kampanye, bekerja sama dengan platform global untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi yang menyesatkan. Upaya tersebut merupakan bukti nyata penerapan tanggung jawab sosial di dunia digital. Selain penindakan, pemerintah juga memperkuat aspek edukatif melalui kampanye #BijakBersosmed dan Gerakan Literasi Digital Siberkreasi agar masyarakat lebih kritis dan beretika dalam berinteraksi di media sosial.

Secara keseluruhan, penerapan etika dan tanggung jawab digital harus dilakukan secara kolektif oleh semua pihak. Pemerintah berperan sebagai pengatur kebijakan, platform digital sebagai pelaksana teknis, dan masyarakat sebagai pelaku utama. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan dunia digital yang aman, beradab, dan bermanfaat. Dengan memahami nilai-nilai etika serta menjalankan tanggung jawab sosial, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi bukan untuk menyebar kebencian, tetapi untuk membangun komunikasi yang lebih manusiawi, produktif, dan membawa dampak positif bagi kehidupan bersama.

Daftar Pustaka

- Amin, Abidin, K. (2021). *Teori-Teori Etika (Riview Buku Etika Karya K. Bertens). TEORI-TEORI ETIKA Review Buku Etika Karya K. Bertens*, 1-26.
- Andi Asari, E. R. S. N. N. S. H. D. M. I. A. R. N. A. B. A. P. F. G. K. G. P. Y. S. M. (2023). *Komunikasi Digital. In Komunikasi Digital*.
- De Fretes, M., & A.W. Kaligis, R. (2018). *Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat. CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(1), 26-34. <https://doi.org/10.35814/coverage.v9i1.1115>
- Dwitri Pilendia. (2020). *Pemanfaatan Adobe Flash Sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika : Studi Literatur. Jurnal Tunas Pendidikan*, 2(2), 1-10. <http://ejournal.stkip-mmb.ac.id/index.php/pgsd/login>
- Ferdinand, G. R., Madallo, E., Palamba, R., Josua, R., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Jaya, U. A. (2017). *Ferdinand, Gregorius Ricky Madallo, Efendi Palamba, Reinaldi Josua, Rigel Manajemen, Jurusan Ekonomi, Fakultas Jaya, Universitas Atma*. 8. <https://www.academia.edu/download/59945653/Filsafat20190706-109794-1180dc1.pdf>
- Lisda Waty Harianja. (2023). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Di Masyarakat. Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 76-81. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i1.2229>
- Magnis Suseno, F. (2013). *Eudemonisme : Epikuros dan Aristoteles. Komunitas Salihara*, 1987, 1-4.
- Natalina Nilamsari. (2014). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Wacana*, 13(2), 177-181. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Patuju, I. (2023). *Etika Menurut Aristoteles dan pandangan teologisnya*. 4-5. http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/cdtmq%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/371051733_Etika_Menurut_Aristoteles_dan_pandangan_teologisnya
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). *The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research. Jurnal Masohi*, 2(1), 42.
- Rukhmana, T. (2021). *Memahami sumber data penelittian. Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28-33.
- Suprayogo, Imam, & Tobroni. (2014). *Metodelogi Penelitian Agama. Metodologi Penelitian*, 102.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta*.